



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

# DOKUMEN PERENCANAAN

## 2025 - 2029

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (Satker PKP NTB) Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

Dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, disusunlah Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Dokumen Perencanaan Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dokumen ini menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan serta strategi Satker PKP NTB selama periode lima tahun ke depan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dokumen perencanaan ini disusun sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dokumen Perencanaan Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 memuat pendahuluan yang mencakup kondisi umum serta potensi dan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, tujuan dan keluaran kegiatan, target kinerja, serta kerangka pendanaan dalam rangka penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam proses penyusunan dokumen ini, khususnya jajaran BP3KP Nusa Tenggara I dan Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Besar harapan kami agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dalam rangka mewujudkan Visi *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Lombok Barat, 31 Desember 2025  
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

**Made Aryati, S.T., M.Eng.**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	3
BAB II.....	9
TUJUAN DAN SASARAN .....	9
A. Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	9
B. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	11
BAB III.....	15
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	15
A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi .....	15
B. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	23
C. Kerangka Kelembagaan .....	23
BAB IV.....	30
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	30
A. Target Kinerja.....	30
B. Kerangka Pendanaan.....	31
BAB V.....	33
PENUTUP.....	33
LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJAAN PENDANAAN.....	35
LAMPIRAN 2 METODE PERHITUNGAN SATKER PKP NTB .....	38



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 .....	3
<b>Tabel I.2</b> Data Backlog Perumahan di Provinsi NTB Tahun 2025 .....	4
<b>Tabel I.3</b> Potensi dan Permasalahan Backlog Perumahan di Wilayah NTB .....	5
<b>Tabel I.4</b> Potensi dan Permasalahan Permukiman Kumuh, Kemiskinan, dan Ketimpangan Layanan Dasar .....	5
<b>Tabel I.5</b> Potensi dan Permasalahan Kerentanan Bencana terhadap Perumahan .....	6
<b>Tabel I.6</b> Potensi dan Permasalahan Keterbatasan Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan MBR .....	7
<b>Tabel I.7</b> Potensi dan Permasalahan Rendahnya Kualitas Sanitasi dan Infrastruktur Dasar Perumahan.....	8
<b>Tabel II.1</b> Tujuan Satker PKP Provinsi NTB .....	9
<b>Tabel II.2</b> Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi NTB .....	12
<b>Tabel II.3</b> Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi NTB.....	13
<b>Tabel III.1</b> Pemetaan SDM Satker PKP NTB Tahun 2025.....	29
<b>Tabel IV.1</b> Target Kinerja Satker PKP Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029.....	30
<b>Tabel IV.2</b> Kerangka Pendanaan Satker PKP Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029.....	31



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> Kerangka Kinerja PKP Satker NTB Tahun 2025 – 2029.....	11
<b>Gambar II.2</b> Kerangka Kinerja DUKMAN Satker NTB Tahun 2025 – 2029 .....	13
<b>Gambar III.1</b> Stuktur Organisasi Satker NTB Tahun 2025.....	25
<b>Gambar III.2</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian.....	26
<b>Gambar III.3</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Gender.....	26
<b>Gambar III.4</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Golongan.....	27
<b>Gambar III.5</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	27
<b>Gambar III.6</b> Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Rentang Usia .....	27



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya kehidupan yang bermartabat, aman, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen global, arah pembangunan nasional dalam bidang perumahan dan permukiman kini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh rakyat adalah prioritas strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penyediaan rumah layak huni, pencegahan dan penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, penguatan pembiayaan perumahan yang terjangkau, serta penyelenggaraan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menegaskan bahwa setiap orang berhak menempati dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Undang-undang tersebut sekaligus mengatur kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai bagian dari pemenuhan hak atas hunian yang layak. Infrastruktur perumahan dan permukiman merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, serta peningkatan daya saing wilayah.

Arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025–2029 adalah “Menjamin peningkatan akses perumahan



yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan”. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, Kementerian PKP menetapkan empat strategi utama, yaitu:

1. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau;
2. Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif;
3. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Satker penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan dan penurunan kegiatan dan untuk capaian target pembangunan tahun 2024 sudah cukup baik. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut.

**Tabel I.1** Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

No	Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
<b>Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni</b>												
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	2.900	4.200	4.240	4.240	4.312	4.312	1.542	1.542	1.275	1.275
3	Jumlah Bantuan pengembangan sarana unian pendukung KSPN	Kawasan	915	915	-	-	1	1	-	-	-	-
4	Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	Unit	-	-	122	122	28	28	-	-	72	72
5	Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	Tower	4	4	1	1	4	4	4	4	1	1
6	Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	Unit	-	-	314	314	120	150	28	28	22	22
7	Jumlah Rumah Khusus Yang Dipelihara	Unit	-	-	40	40	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	Unit	-	-	970	942	795	796	1.300	1.493	700	750
<b>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola</b>												
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Laporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : LAKIP Satker Penyediaan Perumahan Provinsi NTB TA 2024

Pada sasaran Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Penyusunan laporan perencanaan



penyediaan perumahan terealisasi sesuai target dengan capaian 100%. Pada komponen peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, layanan dukungan manajemen satker serta layanan perkantoran masing-masing berhasil direalisasikan sesuai target dengan capaian penuh 100%. Satu indikator terkait layanan sarana dan prasarana internal tidak memiliki target maupun realisasi sehingga tidak dilakukan penghitungan capaian. Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dan layanan yang memiliki target kuantitatif dapat dicapai sepenuhnya, bahkan beberapa indikator melampaui target, yang mengindikasikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja yang baik pada satker.

Pada sasaran Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman, seluruh indikator yang memiliki target menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) terealisasi sebanyak 15.569 unit dari target 14.269 unit atau mencapai 109%. Pembangunan rumah susun juga berhasil memenuhi target sebanyak 222 unit, demikian pula pemeliharaan 14 tower rumah susun yang terealisasi sesuai rencana. Pembangunan rumah khusus sebanyak 514 unit juga mencapai 106% dari target 484 unit. Sementara itu, pemberian fasilitas layanan bantuan PSU kepada MBR melampaui target, yaitu 3.981 unit dari target 3.765 unit, sehingga capaian mencapai 105%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program fisik perumahan berjalan optimal dan efektif.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Berdasarkan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan backlog perumahan nasional. Berdasarkan kondisi terkini serta data dalam dashboard MyPKP, hingga akhir tahun 2023 di Indonesia masih terdapat 26,9 juta Rumah Tangga yang menempati rumah tidak layak huni serta 9,9 juta Rumah Tangga yang belum memiliki rumah (Backlog Kepemilikan). Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kualitas rumah dan penyediaan hunian layak masih sangat besar dan memerlukan intervensi pemerintah secara terarah dan berkelanjutan.



Berdasarkan data Statistik Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, kondisi perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait kualitas fisik rumah dan akses terhadap fasilitas dasar perumahan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan intervensi pembangunan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya berfokus pada penambahan unit rumah, tetapi juga pada peningkatan kualitas rumah eksisting dan penyediaan fasilitas dasar perumahan secara terintegrasi serta penguatan kebijakan perumahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### a. Tingginya Backlog Perumahan di Wilayah NTB

**Tabel I.2** Data Backlog Perumahan di Provinsi NTB Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Kualitas	Total Backlog
1	KAB. LOMBOK TIMUR	60.672	103.393	164.065
2	KAB. LOMBOK TENGAH	22.089	82.866	104.955
3	KAB. LOMBOK BARAT	26.593	59.678	86.271
4	KAB. BIMA	15.939	38.322	54.261
5	KAB. SUMBAWA	12.686	33.066	45.752
6	KOTA MATARAM	26.223	17.085	43.308
7	KAB. LOMBOK UTARA	5.474	28.855	34.329
8	KAB. DOMPU	6.293	16.432	22.725
9	KOTA BIMA	6.042	6.231	12.273
10	KAB. SUMBAWA BARAT	5.364	6.638	12.002
<b>Total</b>		<b>187.375</b>	<b>392.566</b>	<b>579.941</b>

Sumber : Website <https://my.pkp.go.id/dashboardhome>

Berdasarkan data yang terdapat dalam dashboard MyPKP, jumlah backlog perumahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 579.941 KK, yang terdiri atas backlog kepemilikan sebesar 187.375 KK (9,85%) dan backlog kualitas sebesar 392.566 KK (20,64%) masih cukup tinggi, sehingga memerlukan percepatan dan penguatan intervensi program perumahan yang



terarah, terpadu, dan berkelanjutan secara komprehensif dengan melibatkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

**Tabel I.3** Potensi dan Permasalahan Backlog Perumahan di Wilayah NTB

Permasalahan	Potensi	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backlog 579.941 KK menunjukkan kesenjangan besar antara kebutuhan, ketersediaan dan kelayakan hunian.</li> <li>- Backlog kualitas tinggi dibanding backlog kepemilikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis data DTSEN &amp; MyPKP sudah tersedia sebagai dasar perencanaan berbasis data.</li> <li>- Skema BSPS, FLPP, KPP dan kolaborasi CSR dapat dioptimalkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas fiskal terbatas dibanding skala kebutuhan.</li> <li>- Ketergantungan pada alokasi pusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Program Nasional Percepatan 3 Juta Rumah.</li> <li>- Potensi sinergi dengan perbankan (FLPP, KPP) dan mitra CSR daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan harus tetap menjaga kualitas bangunan.</li> <li>- Koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.</li> <li>- Pengendalian harga material dan daya beli MBR.</li> </ul>

#### b. Permukiman Kumuh, Kemiskinan, dan Ketimpangan Layanan Dasar

Data Susenas Maret 2024 oleh BPS Provinsi NTB menunjukkan bahwa permasalahan perumahan di NTB tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rumah, tetapi juga dengan kualitas hunian dan kelengkapan infrastruktur dasar perumahan, yang masih menjadi isu utama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketimpangan kondisi perumahan terlihat lebih nyata di wilayah perdesaan, kawasan pesisir, serta wilayah penyangga perkotaan dan kawasan pariwisata, di mana keterbatasan layanan air bersih, sanitasi, dan prasarana lingkungan masih relatif tinggi.

**Tabel I.4** Potensi dan Permasalahan Permukiman Kumuh, Kemiskinan, dan Ketimpangan Layanan Dasar

Permasalahan	Potensi	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketimpangan kualitas hunian dan layanan air bersih/sanitasi.</li> <li>- Konsentrasi permasalahan di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan penataan kawasan terintegrasi.</li> <li>- Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program sering bersifat sektoral dan belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi dengan K/L/D teknis (PUPR, Kesehatan, Lingkungan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan untuk</li> </ul>



desa, pesisir, dan penyangga pariwisata.	melalui pola swadaya. - Dukungan CSR dan kolaborasi dengan pemda.	sepenuhnya terintegrasi. - Keterbatasan data spasial detail kawasan kumuh. - Kualitas teknis tukang dan fasilitator lokal belum merata.	- Skema CSR perusahaan di kawasan pariwisata. - Integrasi dengan program pengentasan kemiskinan dan desa berdaya.	sanitasi yang layak. - Koordinasi lintas program agar tidak tumpang tindih. - Keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.
--	--	---	--	---

### c. Kerentanan Bencana terhadap Perumahan

Wilayah NTB termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, seperti gempa bumi (Lombok 2018), Erupsi Gunung berapi, banjir bandang (Bima), serta kekeringan di wilayah Sumbawa. Dampak bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik bangunan rumah, tetapi juga menambah beban backlog perumahan melalui kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, perubahan iklim memperparah risiko kekeringan dan banjir, yang berdampak langsung pada ketahanan hunian dan infrastruktur permukiman, sehingga menuntut penguatan pendekatan perumahan tahan bencana dan adaptif iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan program Satker PKP NTB.

**Tabel I.5** Potensi dan Permasalahan Kerentanan Bencana terhadap Perumahan

Permasalahan	Potensi	Kelemahan	Peluang	Tantangan
- Kerusakan rumah akibat gempa, banjir dan bencana lainnya. - Bertambahnya backlog pascabencana.	- Pengembangan model rumah tahan gempa sebagai standar lokal. - Peningkatan kapasitas tukang dan fasilitator lokal.	- Kebutuhan biaya pemulihan pasca bencana cukup besar. - Keterbatasan pengawasan teknis di lapangan. - Pemahaman masyarakat tentang standar	- Dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. - Sinergi dengan BNPB, BPBD, Pemda, dan mitra CSR.	- Frekuensi bencana yang sulit diprediksi. - Keterbatasan anggaran untuk rekonstruksi massal. - Integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang.



		bangunan tahan gempa belum merata.		
--	--	------------------------------------	--	--

#### d. Keterbatasan Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan MBR

Ketersediaan lahan strategis untuk pengembangan perumahan MBR di NTB semakin terbatas, terutama di kawasan perkotaan dan kawasan bernilai ekonomi tinggi. Kompetisi pemanfaatan lahan antara kebutuhan hunian, pengembangan pariwisata, dan fungsi komersial menyebabkan harga tanah meningkat dan sulit dijangkau oleh program perumahan sosial. Di beberapa wilayah, keterbatasan kepastian tata ruang dan status lahan turut menghambat percepatan pembangunan perumahan, sehingga Satker PKP NTB perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam sinkronisasi RTRW, penyediaan lahan, serta skema dukungan pembiayaan yang inovatif.

**Tabel I.6** Potensi dan Permasalahan Keterbatasan Pemanfaatan Lahan untuk Perumahan MBR

Permasalahan	Potensi	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga tanah tinggi dan kompetisi dengan sektor pariwisata/ komersial.</li> <li>- Ketersediaan Lahan dipertanian yang terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi lahan milik pemerintah/ BUMN/ BUMD.</li> <li>- Skema land consolidation atau land banking.</li> <li>- Pengembangan hunian vertikal sederhana di kawasan perkotaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan pada kebijakan RTRW Pemda.</li> <li>- Belum tersedianya bank tanah khusus perumahan MBR.</li> <li>- Koordinasi perizinan masih memerlukan waktu panjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi revisi RTRW.</li> <li>- Dukungan kebijakan nasional penyediaan lahan perumahan sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan harga tanah/ rumah yang merupakan imbas dari pembelian sebagai investasi.</li> <li>- Sulitnya pemanfaatan lahan untuk rumah subsidi di kawasan strategis.</li> </ul>

#### e. Rendahnya Kualitas Sanitasi dan Infrastruktur Dasar Perumahan

Hasil evaluasi pelaksanaan program bantuan perumahan di NTB menunjukkan bahwa kualitas hunian layak masih menjadi tantangan, khususnya terkait pemenuhan akses sanitasi. Sebagian rumah tangga MBR masih belum memiliki sistem sanitasi sesuai standar. Keterbatasan kemampuan swadaya masyarakat,



tingginya biaya material konstruksi, serta keterbatasan dukungan infrastruktur lingkungan menjadi faktor utama yang mempengaruhi capaian kualitas hunian. Kondisi ini menegaskan perlunya integrasi program perumahan dengan penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

**Tabel I.7** Potensi dan Permasalahan Rendahnya Kualitas Sanitasi dan Infrastruktur Dasar Perumahan

Permasalahan	Potensi	Kelemahan	Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses air minum layak dan sanitasi belum memenuhi standar.</li> <li>- Infrastruktur lingkungan belum terbangun merata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan pemberdayaan komunitas.</li> <li>- Dukungan program sanitasi nasional.</li> <li>- Kolaborasi CSR bersama seluruh stakeholder terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan swadaya MBR terbatas.</li> <li>- Tingginya harga material konstruksi.</li> <li>- Pengawasan kualitas bangunan belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi dengan Dinas Terkait di Pemda.</li> <li>- CSR perusahaan untuk pembangunan sarana sanitasi.</li> <li>- Inovasi teknologi sanitasi sederhana dan murah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>- Keberlanjutan pemeliharaan sarana.</li> <li>- Penyesuaian standar teknis dengan kondisi geografis NTB.</li> </ul>



## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan pada level unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, maupun satuan kerja, perumusan mengacu secara langsung pada visi, misi, dan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan arah kebijakan dan konsistensi pencapaian kinerja antara Satker PKP Provinsi NTB dengan Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029, Visi Kementerian PKP selaras dengan visi Presiden yaitu **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”** dengan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman **“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.”** Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

**Tabel II.1** Tujuan Satker PKP Provinsi NTB

<b>TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NTB</b>	
<b>1. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program BSPS secara Tepat Sasaran dan Berkualitas.</b>	Mewujudkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang efektif, tepat sasaran, dan berkualitas melalui penguatan perencanaan teknis, pendampingan masyarakat, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
<b>2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman melalui Penanganan Kumuh, Sanitasi, dan PSU Terpadu.</b>	Mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pelaksanaan penanganan kawasan kumuh, penyediaan dan peningkatan infrastruktur sanitasi, serta pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas



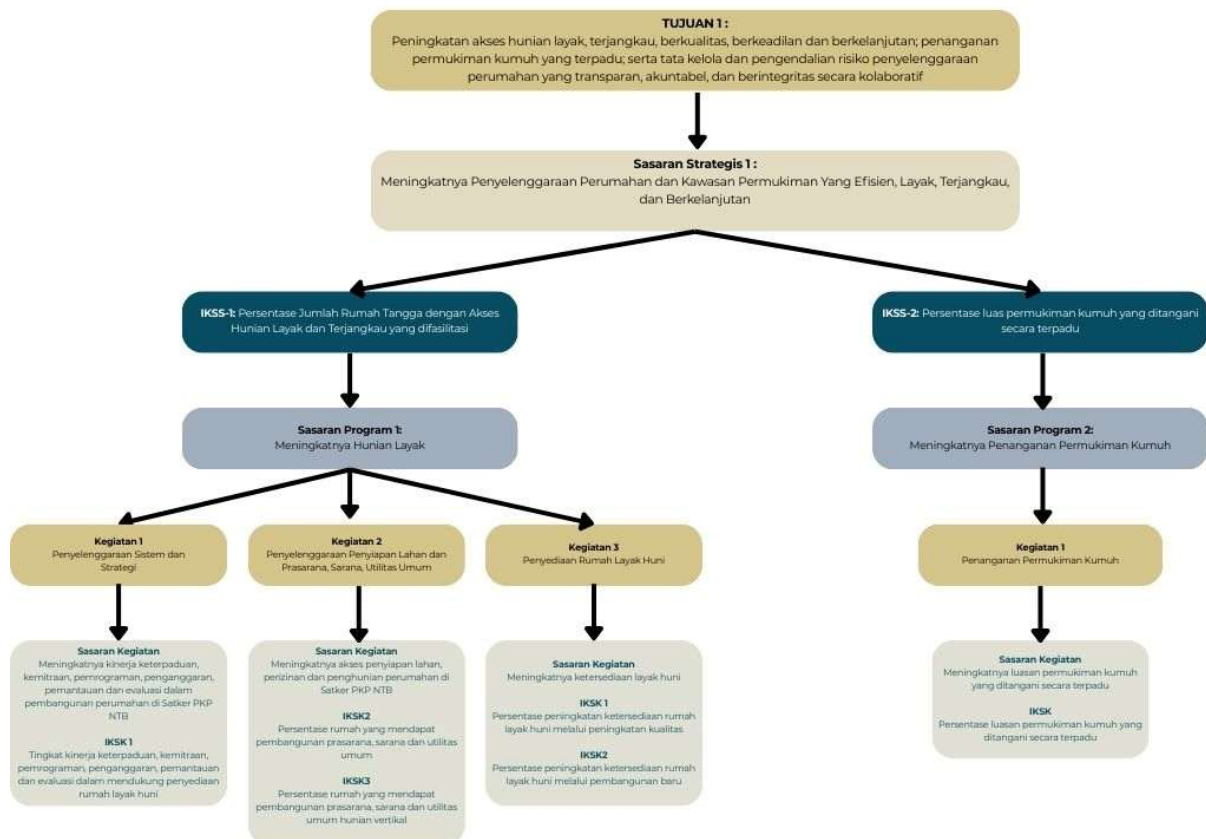
	umum (PSU) perumahan secara terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
<b>3. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</b>	Mendukung pelaksanaan program perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui fasilitasi teknis, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan agar berjalan efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah serta kebijakan nasional.
<b>4. Memperkuat Koordinasi dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</b>	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman melalui penguatan koordinasi, fasilitasi kemitraan, dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif.
<b>5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengendalian Risiko Pelaksanaan Program Satuan Kerja.</b>	Mewujudkan tata kelola pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan sistem pengendalian intern, pemanfaatan data terintegrasi, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.
<b>6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pelaksana Program Perumahan.</b>	Meningkatkan kapasitas pegawai, stakeholder dan seluruh pelaksana program perumahan dan kawasan permukiman di daerah melalui pembinaan teknis, pendampingan, serta penerapan NSPK dan standar pelaksanaan kegiatan secara konsisten.
<b>7. Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Perumahan dalam Pelaksanaan Program.</b>	Mendorong pemanfaatan data dan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program satuan kerja guna meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas intervensi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



## B. Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian PKP di daerah, Satuan Kerja berperan dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan Sasaran Program yang relevan. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan Satker selaras dengan arah kebijakan nasional serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Berikut merupakan penjabaran dari Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB :

**Gambar II.1** Kerangka Kinerja PKP Satker NTB Tahun 2025 – 2029



### 1. Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi NTB

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, Satuan Kerja melaksanakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan ke dalam dua sasaran program, beserta kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut.

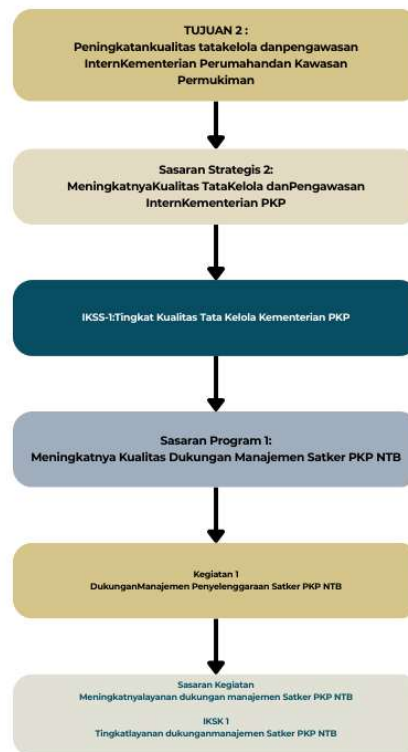


**Tabel II.2 Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker  
PKP Provinsi NTB**

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
- Sasaran Program 1 (SP-1): Meningkatnya Hunian Layak	- Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satker PKP Provinsi NTB.	Tingkat kinerja keterpaduan dan pengendalian program, yang mencerminkan efektivitas tata kelola dalam mendukung penyediaan hunian layak.
	- Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB.	persentase rumah yang mendapatkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yang mencerminkan dukungan satker dalam menciptakan lingkungan perumahan yang layak dan siap huni.
	- Kegiatan 3 : Penyediaan Rumah Layak Huni.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.	- persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas. - persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui Pembangunan baru. Ini menunjukkan kontribusi satker dalam mendorong perbaikan kondisi rumah agar memenuhi standar kelayakan huni.
- Sasaran Program 2 (SP-2) : Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Penanganan Permukiman Kumuh kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu, sebagai indikator keberhasilan integrasi penanganan lingkungan, prasarana dasar, dan kualitas hunian di kawasan kumuh.



**Gambar II.2** Kerangka Kinerja DUKMAN Satker NTB Tahun 2025 – 2029



## 2. Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi NTB

Dalam rangka mendukung pencapaian **Tujuan 2**, yaitu **Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**, Satuan Kerja berperan dalam penguatan fungsi manajerial, administratif, dan pengendalian internal guna mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PKP. Tujuan tersebut diturunkan ke dalam **Sasaran Strategis 2 (SS-2)**, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP**. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya sistem tata kelola yang baik, akuntabel, serta pengawasan intern yang efektif sebagai fondasi penyelenggaraan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.

**Tabel II.3** Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi NTB

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
Sasaran Program: Meningkatnya	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Satuan Kerja PKP NTB.	Meningkatnya layanan dukungan	Tingkat layanan dukungan manajemen



<b>Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja PKP NTB.</b>		<b>manajemen Satuan Kerja PKP NTB.</b>	<b>Satuan Kerja PKP NTB,</b> yang menggambarkan kualitas dan efektivitas layanan manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja secara optimal.
--	--	--	---



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

#### 1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
  - 1) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
  - 2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
  - 3) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
  - 4) Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal.
- b) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:
  - 1) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
  - 2) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
  - 3) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui



pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

- d) Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
- 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 2) Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
  - 3) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - 4) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
  - 5) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
  - 6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**

- a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
  - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
  - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
  - 4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
  - 5) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
- b) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
- 1) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
  - 2) Pengembangan skema tabungan berencana;



- 3) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
  - 4) Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR);
  - 5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
  - 6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- c) Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
- 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
  - 2) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
  - 3) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
  - 4) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
  - 5) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervise penyelenggaraan perumahan perdesaan;
  - 6) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
  - 7) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
  - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di



bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;

- 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
- 5) Penguatan kelembagaan.

### **3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**

- a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
  - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
  - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
  - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
  - 4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b) Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
- c) Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan Kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
  - 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
  - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian



- dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
- 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
  - 5) Penguatan kelembagaan.
- e) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
  - f) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
  - g) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
  - h) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

#### **4. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal**

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
  - 1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya;
  - 2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.



- b) Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
  - 1) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
  - 2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c) Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi:
  - 1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis beban kerja (ABK) dan kompetensi;
  - 2) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
  - 3) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d) Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
  - 1) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
- e) Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
  - 1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
  - 2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f) Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
  - 1) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
  - 2) Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)
- g) Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
  - 1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan



- 2) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h) Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
- 1) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
  - 2) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem e Procurement untuk efisiensi dan transparansi.
- i) Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
- 1) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
  - 2) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j) Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
- 1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan
  - 2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

## **5. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

- a) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
- b) Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.



- c) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut :
- 1) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (Indonesia Green Affordable Housing Program atau IGAHP);
  - 2) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain;
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan;
  - 4) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- d) Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e) Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- f) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
- 1) Governance, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata Kelola dan pengendalian risiko;
  - 2) Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
  - 3) Compliance, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  - 4) Financing, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan
  - 5) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan



## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Arah kebijakan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat difokuskan pada pelaksanaan kebijakan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di tingkat daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas permukiman, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat NTB.

### **a) Percepatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Hunian Layak bagi MBR**

Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan akses MBR terhadap hunian layak melalui:

- 1) Program Rumah Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas RTLH;
- 2) Pembangunan Rumah Khusus bagi kelompok prioritas;
- 3) Pembangunan Rumah Susun sebagai solusi hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Strategi pelaksanaan meliputi penetapan lokasi berbasis data, pendampingan teknis, pengawasan mutu konstruksi, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan lahan dan penetapan penerima manfaat.

### **b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Secara Terpadu**

Kebijakan ini diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui:

- 1) Penanganan Permukiman Kumuh secara terpadu;
- 2) Penyediaan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan perencanaan terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota. Selain itu dapat didukung melalui kolaborasi dengan dunia usaha melalui pemanfaatan dana CSR, khususnya untuk pembangunan fasilitas umum skala lingkungan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, atau dukungan sarana lingkungan permukiman. Pendekatan ini mendorong integrasi pendanaan APBN, APBD, dan partisipasi swasta dalam peningkatan kualitas kawasan.

### **c) Penguatan Dukungan Akses Lahan, Legalitas, dan Penghunian Perumahan**

Arah kebijakan ini mendukung kelancaran pembangunan dan pemanfaatan hasil kegiatan fisik melalui:



- 1) Koordinasi kesiapan lahan untuk Rumah Khusus dan Rumah Susun;
- 2) Sinkronisasi perizinan dengan pemerintah daerah;
- 3) Percepatan penghunian rumah susun dan rumah khusus agar optimal dan tidak idle.

Strategi ini memastikan hasil pembangunan fisik dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

**d) Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Kemitraan Pembangunan Perumahan**

Seluruh kegiatan fisik satker dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah teknis, serta masyarakat. Dalam konteks ini, Satker berperan sebagai fasilitator koordinasi untuk mengintegrasikan program APBN dengan dukungan APBD serta potensi pendanaan alternatif, termasuk CSR dari dunia usaha. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas cakupan penanganan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya pada lokasi prioritas yang membutuhkan dukungan tambahan di luar kapasitas anggaran pemerintah.

**e) Penguatan Tata Kelola, Pengendalian Risiko, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan**

Seluruh kegiatan fisik, meliputi PSU, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, Rumah Susun, dan Penanganan Permukiman Kumuh dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta pengawasan mutu teknis. Penguatan tata kelola dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala, pelaporan capaian output kegiatan, serta pengendalian risiko administratif dan teknis guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

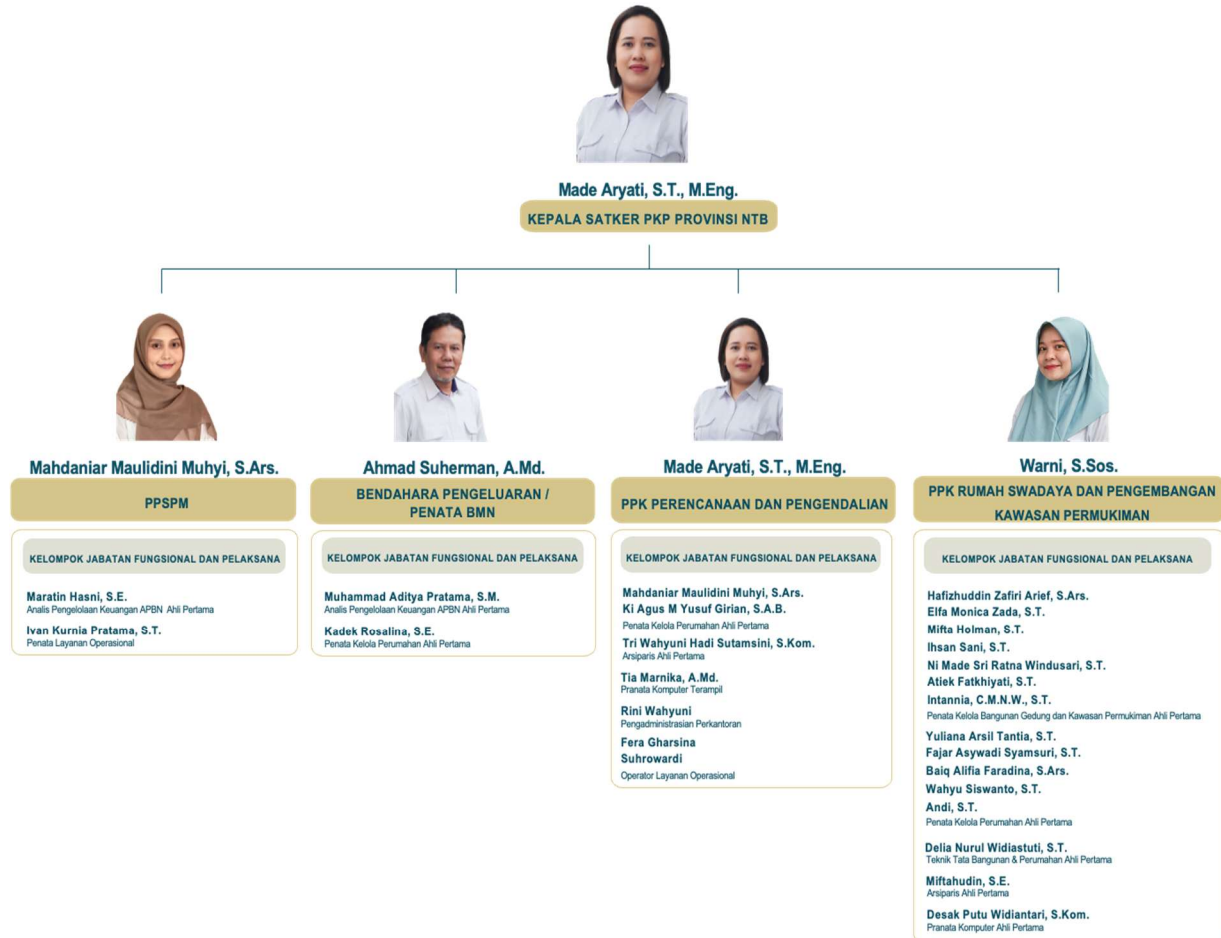
### **C. Kerangka Kelembagaan**

Satker PKP NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi unsur kunci dalam penyelenggaraan manajemen program perumahan dan permukiman. SDM pada satuan kerja memegang peran strategis dalam memastikan ketercapaian target dan sasaran kinerja sesuai kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Kualitas aparatur yang diharapkan mencakup profesionalitas, kompetensi teknis, integritas, orientasi pelayanan, produktivitas, serta kemampuan bekerja secara akuntabel dan



adaptif terhadap dinamika kebijakan sektor perumahan dan permukiman. Struktur organisasi Satker PKP NTB dapat dilihat pada Gambar I.3 di bawah ini.

**Gambar III.1** Struktur Organisasi Satker NTB Tahun 2025

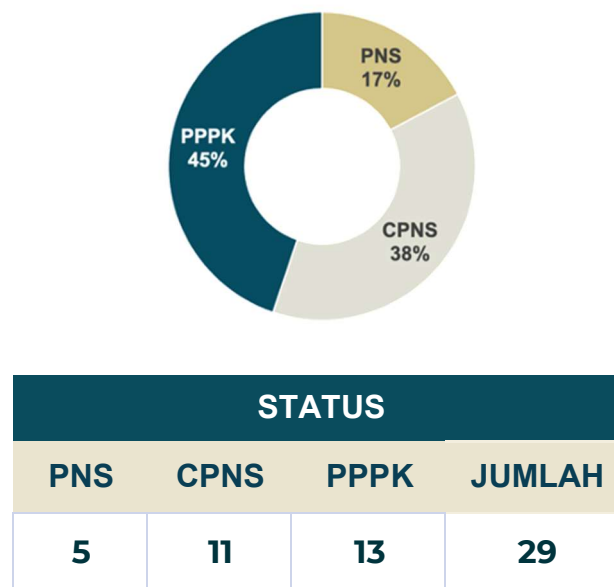


Struktur organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB Tahun 2025 dipimpin oleh Kepala Satker yang membawahi 4 pejabat perbendaharaan, yaitu: PP–SPM, Bendahara Pengeluaran/Penata BMN, PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, serta PPK Perencanaan dan Pengendalian. Keempat jabatan tersebut didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Arsiparis, Pranata Komputer, Teknik Tata Bangunan dan Permukiman, Pengadministrasian Perkantoran, serta Operator Layanan Operasional sebagaimana tergambar pada struktur organisasi.

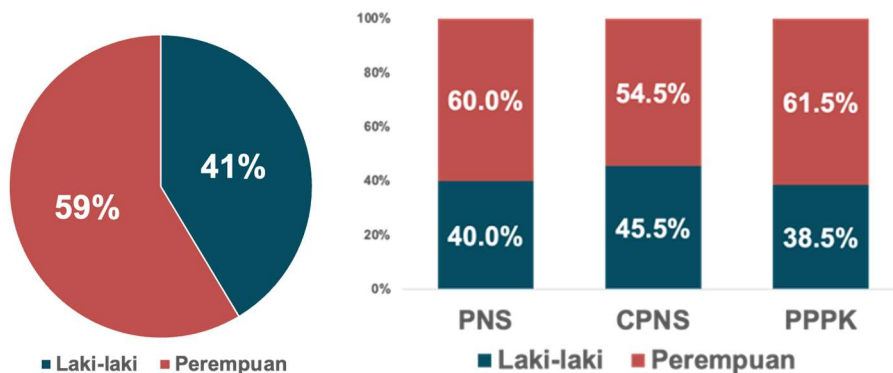


Penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Satker PKP NTB yang memiliki SDM yang dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Jumlah SDM pada Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB di tahun 2025 terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai kebutuhan layanan teknis dan operasional. SDM tersebut dialokasikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan unit kerja, sehingga seluruh proses perencanaan, pengelolaan anggaran, pembangunan fisik, pelayanan administrasi, hingga pemantauan dan pengendalian kegiatan dapat berjalan efektif. Gambaran lengkap komposisi SDM ditampilkan dalam diagram berikut.

**Gambar III.2** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian

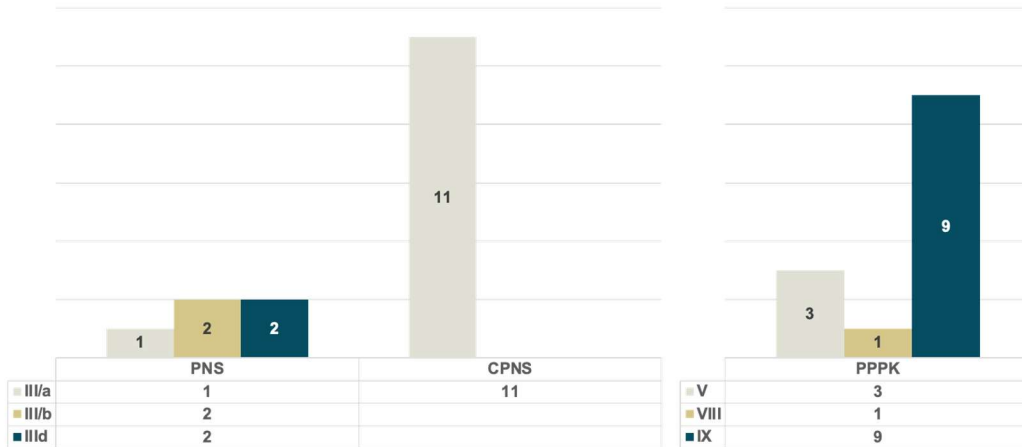


**Gambar III.3** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Gender

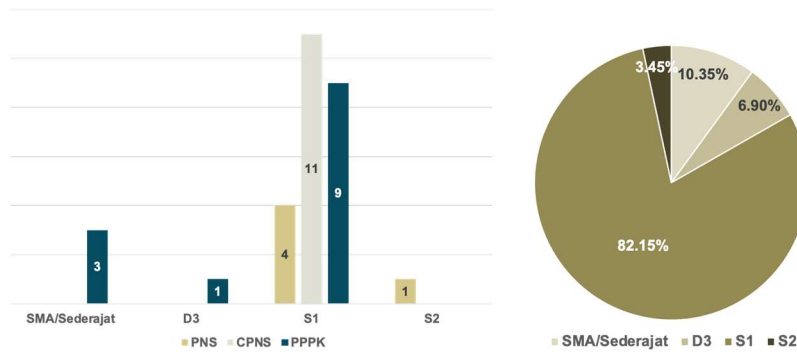




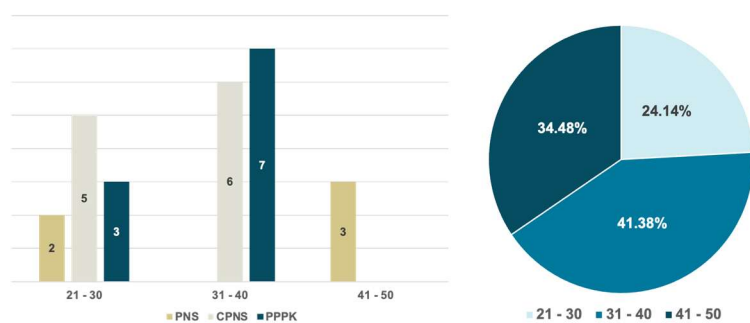
**Gambar III.4** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Golongan



**Gambar III.5** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan



**Gambar III.6** Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Rentang Usia



SDM pada Satker PKP NTB di tahun 2025 berjumlah 29 orang yang mencakup 4 pejabat inti dan 25 pegawai. Berdasarkan golongan, jumlah ASN di Satker adalah 24 orang yang terdiri dari 5 PNS, 11 CPNS, dan 13 PPPK. Dari seluruh pegawai yang bertugas di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat sebanyak 29 pegawai, yang terdiri atas 12 laki-laki dan 17 perempuan. Jumlah pegawai perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki juga



menunjukkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan tugas teknis dan manajerial di lingkungan Satker PKP NTB.

Komposisi ini menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki tenaga kerja yang cukup beragam dan seimbang untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif di sektor perumahan dan permukiman. Dengan kapasitas SDM yang tersedia, satuan kerja diharapkan mampu memenuhi target kinerja dan mendukung penyelenggaraan program prioritas Kementerian PKP secara berkelanjutan dan akuntabel.

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Satker PKP NTB yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Secara struktur internal, Satker ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Susunan organisasi inti Satker terdiri dari:

- a) Kepala Satuan Kerja, bertugas menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, memberikan supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, mengawasi penatausahaan dokumen, serta menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Terdapat PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan PPK Perencanaan dan Pengendalian. Tugas PPK adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak, serta menguji kebenaran tagihan kepada negara.
- c) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bertugas menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya, membebaskan tagihan pada mata anggaran, dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d) Bendahara Pengeluaran, bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga, melakukan pemotongan pajak, serta melakukan pembayaran atas perintah PPK setelah pengujian ketersediaan dana.



- e) Unit Pendukung Teknis dan Administrasi, bertugas untuk mendukung kelancaran operasional, meliputi beberapa Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana yang bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Evaluasi efisiensi pemanfaatan SDM difokuskan pada optimalisasi pembagian tugas, kesesuaian kompetensi dengan jabatan, serta kontribusi pegawai terhadap pencapaian target kinerja. Penilaian dilihat melalui produktivitas tim pelaksana, efektivitas koordinasi antar pejabat dan staf, serta kemampuan dalam menyelesaikan output kegiatan sesuai jadwal dan standar kualitas. Upaya peningkatan efisiensi antara lain dilakukan melalui pelatihan teknis, penguatan kapasitas jabatan, serta pemanfaatan sistem informasi kerja untuk mendukung akselerasi tugas. Adapun analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel III.1** Pemetaan SDM Satker PKP NTB Tahun 2025

No	Jabatan/Formasi	Kebutuhan Ideal	Eksisting Pegawai	Gap Formasi
1.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / Kepala Satker	1	1	0
2.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / PPK	1	1	0
3.	Penata BMN / Analis Keuangan	1	1	0
4.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	9	9	0
5.	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	5	2	-3
6.	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	10	6	-4
7.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	1	1	0
8.	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	2	0	-2
9.	JF Arsiparis Ahli Pertama	2	2	-1
10.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
11.	JF Pranata Komputer Terampil	1	1	0
12.	JF Penata Laksana Barang	1	0	-1
13.	Penata Layanan Operasional	1	1	0
14.	Pengadministrasian Perkantoran	1	1	0
15.	Operator Layanan Operasional (Administrasi)	1	1	0
16.	Operator Layanan Operasional (Pramubakti)	3	1	-2
17.	Operator Layanan Operasional (Pengemudi)	2	0	-2
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>	<b>29</b>	<b>-14</b>

Potret SDM Satker PKP NTB ini berada pada posisi yang masih membutuhkan penambahan pegawai, terutama PNS untuk penempatan posisi pada jabatan perbendaharaan dan teknis sebagai penanggung jawab program/kegiatan sesuai struktur organisasi. Berdasarkan tabel di atas, jumlah SDM yang saat ini dimiliki masih kurang dari yang dibutuhkan.



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Target kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai melalui serangkaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi mandat satuan kerja. Indikator kinerja tersebut menggambarkan tingkat capaian output dan outcome yang dihasilkan, sekaligus menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta sasaran pembangunan perumahan di daerah.

Indikator kinerja kegiatan Satker PKP Provinsi NTB mencakup ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif sesuai karakteristik program. Indikator tersebut disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses hunian layak dan penataan kawasan permukiman secara berkelanjutan di Provinsi NTB. Adapun indikator kinerja kegiatan Satker PKP Provinsi NTB selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel IV.1** Target Kinerja Satker PKP Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
<b>PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak</b>							
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi</b>							
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan		2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum</b>							
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum		-	316 Unit	316 Unit	316 Unit	316 Unit	1.264 Unit
<b>KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni</b>							
Jumlah unit rumah swadaya		1.225 Unit	5.933 Unit	5.933 Unit	5.933 Unit	5.933 Unit	24.957 Unit
Jumlah rumah khusus yang terbangun		-	594 Unit	594 Unit	594 Unit	594 Unit	2.376 Unit
Jumlah rumah susun yang terbangun		-	88 Unit	44 Unit	88 Unit	88 Unit	308 Unit
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh		1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan



<b>SASARAN PROGRAM:</b> Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh						
<b>KEGIATAN:</b> Penanganan Permukiman Kumuh						
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	15 Ha	-	-	-	20 Ha	35 Ha
<b>PROGRAM:</b> DUKUNGAN MANAJEMEN						
<b>SASARAN PROGRAM:</b> Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat						
<b>KEGIATAN:</b> Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat						
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5 Layanan
Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	13 Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5 Layanan
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4 Layanan

## B. Kerangka Pendanaan

Rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 bidang perumahan serta sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Kebutuhan pendanaan tersebut meliputi pembangunan rumah layak huni, peningkatan kualitas perumahan, penanganan permukiman kumuh, fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta berbagai kegiatan pendukung lainnya yang menjadi mandat Satker PKP NTB.

**Tabel IV.2** Kerangka Pendanaan Satker PKP Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	ANGGARAN (Rp Ribu)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
<b>PROGRAM:</b> PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
<b>SASARAN PROGRAM:</b> Meningkatnya Hunian Layak							
<b>KEGIATAN:</b> Penyelenggaraan Sistem dan Strategi							
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan		81.081	75.000	79.050	83.319	87.818	406.268
<b>KEGIATAN:</b> Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum							



Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	-	4.631.591	4.816.116	5.037.547	5.332.788	19.818.042
<b>KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni</b>						
Jumlah unit rumah swadaya	41.650.000	143.623.097	150.787.195	157.951.292	165.115.390	652.700.152
Jumlah rumah khusus yang terbangun	-	255.981.107	263.647.863	276.174.119	288.700.375	1.084.503.464
Jumlah rumah susun yang terbangun	-	165.662.183	83.525.200	174.627.200	182.204.000	606.018.583
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	2.712	-	-	-	-	2.712
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh</b>						
<b>KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh</b>						
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	30.000.000	-	-	-	48.400.000	78.400.000
<b>PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>						
<b>KEGIATAN: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>						
Jumlah Layanan Perkantoran	4.209.721	11.524.570	12.100.799	12.705.839	13.341.131	53.882.060
Jumlah Layanan Umum	6.879	213.500	224.939	236.991	249.690	931.999
Jumlah Layanan Sarana Internal	9.914	104.963	110.211	115.722	121.508	462.318
Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583

Berdasarkan perencanaan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas tersebut adalah sebesar Rp2.503.986.188.003,- sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan target kinerja, kebutuhan lapangan, kondisi permukiman di daerah, pembagian delineasi wilayah di Provinsi NTB, serta arah kebijakan Kementerian PKP, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.



## BAB V PENUTUP

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025–2029 serta Renstra unit eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi Satker PKP Provinsi NTB dalam melaksanakan visi, misi, dan sasaran strategis kementerian, khususnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan percepatan penanganan permukiman berkualitas.

Pencapaian sasaran Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Seiring meningkatnya kompleksitas isu perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak, pembiayaan terjangkau, serta penguatan tata kelola, diperlukan optimalisasi seluruh sumber daya agar pelayanan perumahan dan permukiman dapat dilaksanakan secara efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi NTB.

Melalui pelaksanaan Renstra PKP Tahun 2025–2029 secara konsisten dan didukung oleh sinergi para pemangku kepentingan, Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mencapai peningkatan ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman melalui Program **PSU 1.264 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 24.957 unit, Rumah Khusus 2.376 unit, Rumah Susun 308 unit, Penanganan Kawasan Kumuh seluas 35 hektare**, serta pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman lainnya. Upaya tersebut ditujukan untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni, mengurangi kawasan permukiman kumuh, serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Rencana Strategis ini bersifat adaptif dan terbuka untuk disempurnakan sesuai dengan dinamika lingkungan, perkembangan kebijakan nasional, kebutuhan daerah, serta perubahan karakteristik masyarakat. Sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan perencanaan strategis, Satker PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan mekanisme



evaluasi secara periodik dan berkelanjutan melalui pemantauan capaian indikator kinerja, realisasi fisik dan keuangan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, yang hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya agar pencapaian sasaran strategis dapat terlaksana secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.



## LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJAAN PENDANAAN

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
<b>PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>														
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan</b>														
<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:</b>														
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi													
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Hunian Layak</b>														
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN:</b>														
1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	1	-	-	-	-	1	38.471	-	-	-	-	38.471
2	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	1	-	-	-	-	1	42.610	-	-	-	-	42.610
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	325.187
<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN:</b>														



1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	316	316	316	316	1.264	-	4.631.591	4.816.116	5.037.547	5.332.788	19.818.042
<b>KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni														
<b>OUTPUT KEGIATAN:</b>														
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	1.225	5.933	5.933	5.933	5.933	24.957	41.650.000	143.623.097	150.787.195	157.951.292	165.115.390	659.126.974
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	594	594	594	594	2.376	-	255.981.107	263.647.863	276.174.119	288.700.375	1.084.503.464
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	-	88	44	88	88	308	-	165.662.183	83.525.200	174.627.200	182.204.000	606.018.583
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	1	-	-	-	-	1	2.712	-	-	-	-	2.712
<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS</b>														
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu													
<b>SASARAN PROGRAM:</b> Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh														
<b>KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
<b>OUTPUT KEGIATAN:</b>														
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	15	-	-	-	20	35	30.000.000	-	-	-	48.400.000	78.400.000
<b>SASARAN STRATEGIS 2:</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS</b>														
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													



**SASARAN PROGRAM:**  
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

**KEGIATAN:** Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

**SASARAN KEGIATAN:**  
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

**OUTPUT KEGIATAN:**

1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	5	4.209.721	11.524.570	12.100.799	12.705.839	13.341.131	<b>53.882.060</b>
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	5	6.879	22.500	23.625	24.806	26.047	<b>103.857</b>
3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	116.000	122.264	128.866	135.825	<b>502.955</b>
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	75.000	79.050	83.319	87.818	<b>325.187</b>
5	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	1	1	1	1	1	5	9.914	104.963	110.211	115.722	121.508	<b>462.318</b>
6	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	<b>433.583</b>



## LAMPIRAN 2 METODE PERHITUNGAN SATKER PKP NTB

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<b>PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
SASARAN STRATEGIS 1: <b>Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan</b>					
SASARAN PROGRAM 1: <b>Meningkatnya Hunian Layak</b>					
Kegiatan 1: <b>Penyelenggaraan Sistem dan Strategi</b>					
<b>SK 1</b> Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB	<b>IKSK 1</b> Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	<b>OK 3</b> Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 1 laporan	Non Kumulatif	Internal



		<p><b>OK 7</b> Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perumahan Perkotaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:          2025: 1 laporan          2027: - laporan          2029: - laporan          2026: - laporan          2028: - laporan          Total : 1 laporan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p><b>OK 8</b> Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perumahan Perkotaan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:          2025: - laporan          2027: 1 laporan          2029: 1 laporan          2026: 1 laporan          2028: 1 laporan          Total : 4 laporan</p>	Non Kumulatif	Internal



Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
<b>SK 1</b>	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB	<b>IKSK 1</b>	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	<b>OK 1</b>	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum  <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 316 unit 2029: 316 unit 2026: 316 unit 2028: 316 unit Total : 1,264 unit	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni								
<b>SK 1</b>	Meningkatnya ketersediaan layak huni	<b>IKSK 1</b>	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	<b>OK 1</b>	Jumlah unit rumah swadaya  <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1,225 unit 2027: 5,933 unit 2029: 5,933 unit 2026: 5,933 unit 2028: 5,933 unit Total : 24,957 unit	Non Kumulatif	Internal



	<b>IKSK 2</b> Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	<b>OK 2</b> Jumlah rumah khusus yang terbangun  <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 594 unit 2029: 594 unit 2026: 594 unit 2028: 594 unit Total : 2,376 unit	Non Kumulatif	Internal
		<b>OK 3</b> Jumlah rumah susun yang terbangun  <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 44 unit 2029: 88 unit 2026: 88 unit 2028: 88 unit Total : 308 unit	Non Kumulatif	Internal



	<b>IKSK 3</b>	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	<b>OK 5</b>	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	<p>Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut:  2025: 1 laporan  2027: - laporan  2029: - laporan  2026: - laporan  2028: - laporan  Total : 1 laporan</p>	Non Kumulatif	Internal	
<b>SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>								
<b>Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh</b>								
<b>SK 1</b>	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	<b>IKSK 1</b>	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	<b>OK 1</b>	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu  <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	<p>Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.</p> <p>Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Target tahunan sebagai pelaksana (Ha):  2025: 15 Ha  2027: - Ha  2029: 20 Ha  2026: - Ha  2028: - Ha  Total: 35 Ha</p>	Non Kumulatif	Internal



PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB						
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB						
<b>SK 1</b> Meningkatkan layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB	<b>IKSK 1</b> Tingkat layanan dukungan manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB	<b>OK 1</b> Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal	
		<b>OK 2</b> Jumlah Layanan Umum <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal	



		<p><b>OK 3</b> Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p><b>OK 5</b> Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan</p>	Non Kumulatif	Internal
		<p><b>OK 6</b> Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)</p>	<p>Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB</p> <p>Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan</p>	Non Kumulatif	Internal



		<b>OK 12</b> Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB  Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
--	--	--	--	---------------	----------